

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

Tria Patrisya
NPP. 29.0519

Asdaf Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan publik

Email: triapatrisya123@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement : The Covid-19 pandemic that has occurred has had an impact such as a decline in economic growth, the threat of loss of income, and the fulfillment of basic household needs due to the threat of health problems. The Rejang Lebong Regency Government has also taken a policy regarding the emergency situation caused by the Covid-19 pandemic. One of them is by issuing a regulation, namely Rejang Lebong Regent Regulation Number 25 of 2020 concerning Strategy for Development of Community-Based Total Sanitation Programs During the New Normal Period of the 2019 Corona Virus Disease Pandemic in Rejang Lebong Regency. However, in the implementation, there are often obstacles. **Objective:.** Within the scope of the regional government of Rejang Lebong Regency in tackling the impact of the COVID-19 pandemic, namely the Health Service which plays a role in the implementation in the health sector, which is contained in Regent Regulation No. In Rejang Lebong Regency so that they can find out the implementation of the policy. **Methods:** using qualitative research with descriptive methods and inductive approaches using data collection techniques through interviews, observations, and documentation which are analyzed based on the analysis of Miles and Huberman which consists of 3 steps namely, Data Collection, Data Reduction, Data Display or Verification. **Results/Findings:** The Rejang Lebong Regency Government through the Regional Apparatus Organization, namely the Health Office, issued policies and work programs, namely the Community-Based Total Sanitation Program which must be implemented with the aim of tackling the impact of the COVID-19 pandemic that occurred in Rejang Lebong Regency where the implementation of the program has been running quite well. good although there are still some problems. **Conclusion:** In the implementation of the program, there are obstacles in dealing with COVID-19, including the lack of socialization and lack of public awareness regarding a Clean and Healthy Lifestyle, culture, land, community habits, lack of action, community mindset, and the provision of clean water in areas that are somewhat remote and difficult to access. become one of the obstacles in implementing this. The handling of the impact of the COVID-19 pandemic is in accordance with the applicable Standard Operating Procedures and there is good coordination with relevant agencies as well as internal and external parties for the prevention of COVID-19.

Keywords: Implementation, Policy, Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan : Pandemi Covid-19 yang terjadi menimbulkan dampak seperti diperkirakan akan terjadi kemerosotan pertumbuhan ekonomi, ancaman kehilangan pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga disebabkan ancaman gangguan kesehatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong juga mengambil kebijakan atas situasi darurat yang diakibatkan pandemic Covid-19 . Salah satunya dengan mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Masa New Normal Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Rejang Lebong. Namun di dalam pelaksanaan implementasi seringkali terjadi hambatan-hambatan. **Tujuan:** Di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 yaitu Dinas Kesehatan yang berperan dalam pelaksanaan di bidang kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Bupati No 25 tahun 2020 tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Masa New Normal Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Rejang Lebong sehingga dapat mengetahui implementasi dari kebijakan tersebut. **Metode :** menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis berdasarkan analisa yaitu Miles and Huberman yang terdiri dari 3 langkah yakni, Data Collection, data Reduction , Display Data atau Verifikasi. **Hasil/Temuan:** Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melalui Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Kesehatan mengeluarkan kebijakan dan program kerja yakni Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang harus dilaksanakan dengan tujuan sebagai upaya menanggulangi dampak pandemi covid-19 yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong dimana implementasi dari program tersebut sudah berjalan cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kendala. **Kesimpulan:** Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat kendala dalam penanggulangan covid-19 diantaranya kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat, budaya, lahan, kebiasaan masyarakat, kurangnya action, mindset masyarakat, dan penyediaan air bersih di daerah yang agak jauh dan sulit diakses menjadi salah satu kendala didalam pengimplementasian ini. Penanggulangan dampak pandemi covid-19 sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan terdapat koordinasi yang baik dengan instansi terkait juga pihak internal maupun eksternal untuk penanggulangan covid-19.

Kata kunci : Implementasi ,Kebijakan, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini negara-negara di dunia sedang dilanda wabah penyakit menular yang kita kenal dengan pandemi Covid-19. Virus yang diberi nama Virus yang diberi nama corona virus disease 2019 atau yang disingkat Covid-19 pertama kali muncul di negara China tepatnya di kota Wuhan pada Tahun 2019. Di Indonesia sendiri pertama kali terkonfirmasi kasus Covid-19. pada bulan Maret 2020 dengan kasus positif Covid sebanyak 2 orang, setelah itu korban Covid-19 terus mengalami kenaikan begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan virus ini. Kabupaten Rejang Lebong memiliki angka kasus Covid-19 yang terus mengalami peningkatan setiap bulannya. Kenaikan drastis terjadi Pada Bulan Mei yaitu sebanyak 61,30 %

dari Bulan April 2021 (dari 282 kasus, naik menjadi 460 kasus) dan kenaikan yang signifikan juga terjadi di Bulan Agustus 2021 yaitu sebanyak 45,55% (dari 615 kasus di Bulan Juli menjadi 1350 kasus). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Bapak Syamsir, S.KM., M.KM pada Tanggal 10 September 2021 dikatakan bahwa dampak Covid-19 berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama dibidang kesehatan yang menjadi akar atau sumber dari dampak di bidang lainnya seperti di bidang sosial dan ekonomi begitu pula dari sisi kehidupan masyarakat terkait hubungan antar manusia. Pemerintah daerah harus berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat atau dengankata lain satu komando sesuai dengan instruksi menteri. Oleh karena itu sebagai langkah selanjutnya dalam menanggapi kebijakan dari pemerintah pusat, penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan strategis untuk daerahnya masing-masing dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong juga mengambil kebijakan-kebijakan atas situasi darurat yang diakibatkan pandemic Covid-19. Salah satunya dengan mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Masa New Normal Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam peraturan bupati tersebut disebutkan bahwa perlu diadakannya program yang mendukung perilaku hidup bersih di Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19, yaitu program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Tujuannya ialah mencegah dan mengendalikan Covid-19 di daerah, menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku penciptaan kondisi Sanitasi Total; dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau. Adapun kebijakan dan program kerja yang dibahas terkait upaya penanggulangan Covid-19 yaitu Peraturan Bupati No 25 Tahun 2020 tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Pada Masa New Normal Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Rejang Lebong. Kebijakan dan program kerja tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu membahas faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung program kerja dan kebijakan tersebut serta upaya-upaya untuk meningkatkan penanggulangan dampak Covid-19.

1.2. Permasalahan

Pandemi Covid-19 yang terjadi menimbulkan dampak seperti diperkirakan akan terjadi kemerosotan pertumbuhan ekonomi, ancaman kehilangan pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga disebabkan ancaman gangguan kesehatan. Selain itu Dampak pandemi Covid-19 ini berimbas ke seluruh lapisan masyarakat terutama terkait dengan masalah ketahanan pangan dasar dan nutrisi yaitu terjadinya krisis pangan yang selanjutnya menyebabkan kemiskinan jangka panjang. Provinsi Bengkulu memiliki angka kasus Covid-19 yang cukup tinggi, terutama di daerah Kabupaten Rejang Lebong. Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong juga mengambil kebijakan-kebijakan atas situasi darurat yang diakibatkan pandemic Covid-19 . Salah satunya dengan mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Masa New Normal Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Rejang Lebong. Tujuannya ialah mencegah dan mengendalikan Covid-19 di daerah, menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku penciptaan kondisi Sanitasi Total; dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau. Namun di dalam pelaksanaan implementasi seringkali terjadi hambatan-hambatan seperti yang dijelaskan oleh Jeddawi, (2008) yaitu “ketidakmampuan pemerintah daerah di dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya termasuk mengimplementasikan Perda disebabkan oleh berbagai faktor intenal, misalnya kurangnya dukungan dana, terbatasnya sumber daya manusia yang akan menanganinya, serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang kurang mendukung.” Implementasi kebijakan atau Perda memang sudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah dapat dilaksanakan, padahal dalam praktek pelaksanaannya senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber daya (sumber-sumber kebijakan) sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19 tahun 2021. Metode penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kebijakan dan upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam penanggulangan dampak Covid-19. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan yang diambil pemerintah DKI Jakarta terkait penanggulangan dampak Covid-19 belum dapat diterapkan dengan baik di masyarakat dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti ketidakpatuhan masyarakat dan koordinasi yang lemah sehingga diperlukan adanya integrasi tata kelola pemerintahan antara

pusat dan daerah untuk menciptakan kerja sama yang solid dan profesional. Penelitian Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid19 beserta dampaknya. Hasil penelitian ini yaitu ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan kasus covid-19 yang terjadi di Indonesia, seperti Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Kebijakan Ekonomi dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Penelitian Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia tahun 2020 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah serta bagaimana implementasinya berdampak pada penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kurang berjalan baik seperti respon pemerintah yang lambat dan negativenya narasi (komunikasi publik yang disampaikan oleh elit politik sehingga menciptakan gelombang tsunami Covid-19 di Indonesia. Penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan Covid-19 di kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Provinsi Jambi beserta penerapannya. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemerintah kecamatan juga mengingatkan atau menghimbau agar masyarakat tetap melakukan physical distancing dan mengikuti berbagai protokol kesehatan demi mencegah penularan virus Covid-19 ini. peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di telah diberlakukan oleh pemerintah dalam masyarakat setempat untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Penerapan yang diberikan oleh Pemerintah dalam mengupayakan tidak terjadinya peningkatan dampak covid-19 terhadap masyarakat karna itu pemerintah membatasi kegiatan masyarakat diluar rumah selama pandemi. Seperti dapat kita lihat pemerintah seringkali menghimbau para masyarakat untuk keluar rumah jika hanya seperlunya saja, bahkan didalam pendidikan saja dilakukan secara daring.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni meneliti Implementasi Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam

menanggulangi dampak pandemi Covid-19 dimana kasus Covid-19 ini baru terjadi di tahun 2020 dan penulis meneliti hal ini dalam rangka membuat referensi ataupun temuan terbaru terkait implementasi dari suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini diukur berdasarkan teori Charles O. Jones yang terdiri dari 3 indikator yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dan program kerja yang diambil pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan dan program kerja tersebut.

II. METODE

Penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis berdasarkan analisa yaitu Miles and Huberman yang terdiri dari 3 langkah yakni, Data Collection, data Reduction, Display Data atau Verifikasi. Dalam hal ini Sugiyono (2007;3) menjelaskan bahwa “Metode kualitatif dapat memberikan makna data yang lebih jelas dan dipahami. Dalam hal ini, makna berarti data yang didapatkan merupakan data sesungguhnya, adapun data pasti adalah suatu nilai dibalik data yang tampak”. Informan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian adalah informan yang benar-benar mengetahui budaya atau kultur dalam lokasi yang akan menjadi objek penelitian, dengan begitu informan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam. ada 7 informan diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit, Kabid Kesehatan Lingkungan, Kepala Puskesmas, Kader Kesehatan, Saniter dan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan membahas tentang Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dalam 19 di Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan teori implementasi dari Charles O. Jones serta bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat sebagai upaya penanggulangan dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Charles O.Jones dengan 3 dimensi, yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Penulis melakukan analisis dari informasi dan data yang diperoleh melalui wawancara dengan

narasumber dan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data terkait dengan hasil penelitian. Berikut hasil analisis yang dilakukan penulis terkait Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2020 tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Masa New Normal Pandemi Covid-19

3.1 Organisasi

Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat diharapkan mampu diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi serta tujuan organisasi yang dibentuk. Indikator dalam penilaian dimensi organisasi implementasi kebijakan penanganan Covid-19 antara lain :

- a. Sumber Daya Aparatur dan Unit Kerja, indikator dari pembentukan setiap unit kerja, tim koordinasi , dan sumber daya aparatur telah disusun dan dipertimbangan dengan secara matang. Sehingga baik Tim Koordinasi maupun tim teknis sebagai unit pelaksana program Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat juga telah sesuai dengan kebutuhan program yang akan dilaksanakan.
- b. Dukungan Sarana Teknologi dan Informasi , Pada indikator dukungan sarana teknologi dan informasi dalam program ini sudah cukup berperan dan membantu jalannya program. Dimana ada beberapa aplikasi dan website yang bisa diakses masyarakat luas yaitu Sanimas, Jamban Komunal, serta aplikasi Kotaku. Selain itu teknologi yang digunakan dalam mendukung program ini yaitu adanya sosialisasimelalui sosial media, selain itu juga dicetak banner-banner yang bertuliskan bahasa daerah agar masyarakat sekitar mengerti terkait program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini.
- c. Komunikasi dan koordinasi pihak-pihak yang terlibat (hubungan kerja) , Berdasarkan keterangan dari seluruh informan yang merupakan perwakilan dari seluruh SKPD terkait, bahwa koordinasi saat ini telah terjalin dengan baik tanpa suatu hambatan berarti. Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan rapat bersama secara rutin yang membahas masing-masing program kerja dan hambatan yang mungkin ditemui selama pelaksanaan program.

3.2 Interpretasi

Dimensi interpretasi merupakan hal utama dalam implementasi kebijakan public. Interpretasi merupakan indikator yang sangat penting dalam implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Selain itu dibutuhkan pedoman yang dapat dipahami oleh implementator melalui interpretasi program tersebut. Pada dimensi ini penulis mengkaji beberapa indikator penilaian seperti :

- a. Penyampaian dan Pengarahan Rencana Program , Setelah adanya pengarahan langsung dari dinas kesehatan terkait program ini, barulah kader-kader kesehatan yang ditunjuk langsung oleh

masing-masing puskesmas akan melakukan kegiatan atau turun langsung ke lapangan dan melaksanakan program ini baik itu melalui sosialisasi maupun kegiatan pemucuan. Kader-kader tersebut sudah dibekali oleh materi terkait Sanitasi Total berbasis Masyarakat sehingga mereka dapat dengan efektif melaksanakan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengimplementasian program ini sebagai salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong.

b. Kejelasan prosedur yang mudah dipahami dan sesuai kebutuhan, Kejelasan prosedur yang menjadi acuan adalah panduan dari pemerintah pusat dan beberapa produk hukum daerah. Seperti yang dijelaskan narasumber dari puskesmas “Pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sudah sesuai dengan SOP dimana selalu memantau hasil capaian kinerja dan melakukan evaluasi baik dari progres kegiatan maupun capaian kinerja. Evaluasi dilakukan secara bertahap setiap 3 bulan , persemester ataupun di akhir tahun”.

3.3 Aplikasi

Dimensi aplikasi dalam implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dalam upaya penanggulangan dampak pandemi covid-19 dinilai dari beberapa indikator,

a. Komitmen Pimpinan dan konsistensi pimpinan dalam pelaksanaan program, program ini dilakukan secara konsisten dan rutin dengan dibuatnya jadwal-jadwal pelaksanaan program, namun tetap dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Apalagi ketika musim pandemi covid-19 yang sedang meningkat, pelaksana program memutuskan untuk melakukan sosialisasi rutin melalui zoom atau sosial media, atau untuk bertatap muka dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Pengalokasian dana sesuai prioritas, Mengenai anggaran program/kegiatan yang berjalan dibebankan pada APBD dan APBN. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong menjelaskan bahwa Dana yang digunakan dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini terutama pada saat pandemi menggunakan APBN dan APBD , sedangkan untuk dana desa dapat digunakan untuk memaksimalkan kegiatan STBM. Anggaran yang berasal dari pusat nantinya langsung diturunkan kepada Puskesmaspuskesmas di wilayah Kabupaten Rejang Lebong untuk langsung mengelola anggaran terkait pelaksanaan program STBM ini. Kemudian Narasumber dari pihak Puskesmas Curup mengatakan bahwa dana atau anggaran yang disusun untuk pelaksanaan program Sanitasi Total berbasis Masyarakat ini berasal dari dana APBN dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dimana dana tersebut akan langsung diberikan kepada puskesmas masing-masing sebagai pelaksana teknis dari kegiatan dalam program ini.

c. Pengawasan dalam penerapan program, dalam setiap kegiatan program yang menjadi suatu kebijakan dari pemerintah ketika pelaksanaannya pastinya akan ada kegiatan pengawasan

ataupun monitoring. Dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong sendiri yang turun langsung untuk melihat dan memonitoring jalannya kegiatan ini agar tetap berjalan dengan baik dan efektif.

d. Evaluasi terhadap pelaksanaan program, Dalam kegiatan evaluasi ini terlihat bahwa pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagai upaya penanggulangan dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan langsung oleh narasumber dan adanya data peningkatan akses Cuci Tangan Pakai Sabun yakni pilar kedua program STBM serta penurunan angka penyakit berbasis lingkungan. Masyarakat sudah lambat laun merasakan manfaat dari program ini, walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala ataupun hambatan.

Adanya peningkatan akses sarana sanitasi terutama pada akses sarana CTPS dengan peningkatan sebesar 19,5%. Data perubahan peningkatan akses sanitasi ini bersumber dari aplikasi pelaporan (monitoring dan evaluasi) Smart STBM yang merupakan aplikasi monitoring STBM nasional yang dirancang oleh Kementerian Kesehatan yang berbasis android. Data capaian ini merupakan hasil monitoring perkembangan akses sanitasi yang diupdate secara realtime oleh tenaga sanitasi (Kesehatan Lingkungan) di tiap Puskesmas yang berbasis laporan kader kesehatan di 211 didesa/kelurahan. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat selain bertujuan sebagai upaya penanggulangan dampak pandemi covid-19, mengendalikan angka covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong juga menurunkan angka penyakit berbasis lingkungan. Data menunjukkan adanya trend penurunan jumlah kejadian penyakit berbasis lingkungan khususnya pada periode bulan Agustus-Oktober jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (April-Juli) sebesar 843 kasus (15,1%). Sesuai dengan tujuan pelaksanaan proyek perubahan ini diharapkan dalam jangka menengah (6 bulan) setelah pelaksanaan PKN ini terjadi penurunan angka kejadian penyakit sebesar 40% dan dalam jangka panjang (1 tahun) setelah pelaksanaan PKN angka kejadian penyakit berbasis lingkungan di Kabupaten Rejang Lebong dapat menurun sebesar 70%.

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Berikut adalah beberapa faktor pendukung Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2020 tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Masa New Normal Pandemi Covid-19

1. Telah tersedia anggaran yang bersumber dari pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di tingkat Puskesmas

2. Adanya dukungan dari Wakil Bupati Rejang Lebong selaku wakil unsur pemerintah daerah dengan harapan adanya Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2020 tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, karena merubah perilaku tidak mudah.
3. Adanya dukungan dari organisasi keagamaan dalam hal ini Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk penerapan perilaku CTPS sebagai pengganti sarana kobokan yang selama ini dipakai untuk kegiatan dan acara di Kabupaten Rejang Lebong
4. Adanya dukungan dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Rejang Lebong, yang telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.
5. Adanya dukungan dari DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang berharap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2020 tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini dapat diaplikasikan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
6. Adanya Dukungan dari Institusi Pendidikan (Universitas Pat Petulai) dengan adanya rencana gerakan tanam tanaman bahan antiseptik alami dengan pembuatan Petunjuk teknis cara penanaman tanaman serai wangi, aloe vera dan lain-lain.
7. Adanya dukungan dari Organisasi Kepemudaan Rejang Lebong yang siap membantu dalam mendukung kegiatan Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2020 tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat termasuk dalam penyebarluasan Peraturan Bupati tentang STBM.
8. Adanya dukungan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) berupa uang tunai senilai RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai stimulan kegiatan percepatan peningkatan akses CTPS di Kabupaten Rejang Lebong
9. Adanya dukungan sarana CTPS stimulan dari BPJS Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 50 unit.
10. Adanya dukungan dana percepatan dan stimulan dari UPT Puskesmas se-Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 475 unit sarana CTPS.
11. Penandatanganan komitmen dukungan dituangkan dalam papan banner dan dokumen kesepakatan (terlampir)

(Sumber : Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan)

Berikut adalah beberapa faktor penghambat Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2020 tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat di Masa New Normal Pandemi Covid-19 Berdasarkan Teori Charles O. Jones

a. Organisasi

Hambatan ini sering terjadi atau muncul di dalam proses implementasi akibat adanya problem-problem di dalam manajemen organisasi pada saat penyusunan implementasi tersebut, seperti gaya kepemimpinan, tim yang kurang solid, pembentukan tim kerja yang kurang efektif, dan kurang aktifnya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat.

b. Interpretasi

Kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Pola Hidup Bersih dan Sehat, budaya, lahan, kebiasaan masyarakat, kurangnya action, mindset masyarakat, dan penyediaan air bersih di daerah yang agak jauh dan sulit diakses menjadi salah satu kendala didalam pengimplementasian ini. Selain itu juga masih ada yang belum terlatihnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan teknis program STBM di 21 Puskesmas dan kader kesehatan lingkungan (1.560 kader) yang tersebar di 156 desa/kelurahan (Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan).

c. Aplikasi

Untuk evaluasi dan pengawasan masih bersifat interen dimana kepala dinas sendiri yang berperan mengawasi jalannya program namun selalu melaporkan kepada pihak pusat sehingga hasil yang diperoleh masih belum bisa secara detail. Untuk alokasi dana berasal dari APBN dan APBD, sedangkan untuk dana desa dapat digunakan untuk memaksimalkan kegiatan STBM.

3.5 Upaya - Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengimplementasian Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2020 tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Masa New Normal Pandemi Covid-19

1. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada masa New Normal Pandemi Covid 19 yaitu dengan cara penyusunan jadwal kegiatan sosialisasi tingkat Kabupaten, Kecamatan/Puskesmas dan Desa/Kelurahan.
2. Membangun jejaring kemitraan stakeholder dalam pelaksanaan program STBM dimasa pandemi Covid 19 seperti BPJS, Ketua DPRD, BMA, dll.
3. dengan bekerja sama dengan kepala wilayah, sehingga undangan untuk pelaksanaan sosialisai terkait program STBM dilakukan oleh kelurahan. Kepala wilayah sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan masyarakat ikut terlibat dan mengambil andil dalam mengajak masyarakat mengikuti sosialisasi program STBM ini.

4. Pembentukan tim teknis STBM tingkat Kabupaten, Puskesmas/Kecamatan dan Desa/kelurahan. Serta diadakannya Pelatihan teknis (training) tim teknis STBM di tingkat Puskesmas/Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

5. Melalui edukasi kepada masyarakat yang tak bosan-bosan, kemudian selalu gunakan fasilitas yang ada baik jaringan internet, sosial media, maupun pertemuan-pertemuan langsung. Sampaikan informasi mengenai STBM walaupun hanya sedikit namun sering dilakukan ataupun kegiatan lain, sehingga masyarakat lambat laun akan familier dengan STBM ini.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan indikator penelitian diantaranya organisasi, interpretasi, dan aplikasi penulis mendapatkan bahwa implementasi kebijakan dan program kerja pemerintah daerah dalam penanggulangan covid-19 ini terdapat beberapa keunggulan dari penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya : Kita analisis dari ketiga indikator penelitian yaitu yang pertama organisasi dimana pemerintah daerah kabupaten rejang Lebong melalui dinas kesehatan membentuk tim-tim kerja dengan pembagian tugas masing-masing. Dalam interpretasi dibangunnya komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar pihak baik secara langsung maupun via sosial media. Kemudian aplikasi yaitu terkait dengan pelaksanaannya mulai dari persiapan sampai evaluasi beserta hal-hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tersebut.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dari pelaksanaannya yaitu meliputi egosentris sektoral masing-masing tim, kurangnya kesadaran masyarakat, serta masih ada beberapa anggota tim yang belum terlatih serta faktor pendukung pelaksanaan program yaitu terdapat faktor pendukung yaitu: tingginya komitmen pimpinan daerah, tersedia anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) serta dukungan dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagai upaya dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Charles. O Jones dalam menganalisis implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan 3 dimensinya yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi. Berdasarkan uraian yang ada dapat kita simpulkan bahwa implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Rejang Lebong sudah berjalan dengan baik. Hal ini

dapat dinilai dari indikator-indikator yang terdapat di dalam 3 dimensi teori Charles O. Jones. Indikator tersebut yaitu mengenai sumber daya aparatur, komunikasi dan koordinasi, penggunaan teknologi informasi, penyampaian dan pengarahan program, prosedur yang tepat, komitmen pimpinan, penggunaan alokasi anggaran, evaluasi dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya juga terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat baik dari pihak internal atau pun pihak eksternal pelaksana program. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong dalam mengatasi hambatan implementasi program Sanitasi Total Berbasis masyarakat, yaitu melakukan sosialisasi dan pemicuan serta edukasi terhadap masyarakat terkait pilar kedua STBM yakni pentingnya Cuci Tangan Pakai Sabun, membangun jejaring kemitraan dengan pihak internal maupun eksternal, dan pembentukan serta pelatihan teknis (training) tim teknis STBM di tingkat Puskesmas/Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Dengan segala keterbatasan dikarenakan penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19.

Arah Masa Depan Penelitian : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan khususnya Lembaga yang berwenang dalam hal pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 ini dan penulis juga berharap mampu memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang bermanfaat untuk kedepannya..

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Afriva, K. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Impelementasinya dalam bidang pendidikan. Program Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME)*.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press.
- Handoyo, E. (2012). *Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Rusfiana, Yudi, & Abdoellah, A. Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Said, Z. A. (2019). *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika.
- Situmorang, C. (2016). *Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. SSDI.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (19th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif Dan R & D)*. Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan*. Ombak.
- Tachjan. (2006). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK*. AIPI Bandung.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Keempat). Kencana.

2. Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pada Masa New Normal Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Rejang Lebong

3. Jurnal

- Agustino, Leo. 2020. Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*. 16(2) : 253-270
- Frederik, Adriel Juan, and Johnny Hanny Posumah, 'KRITERIA MANAJEMEN PELAYANAN PADA PENYUSUNAN PROGRAM'
- Hapsari Veneranda Rini, Usman, Rissa Ayustia. 2020. Pengembangan Objek Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Daerah Perbatasan. *Jurnal Maneksi*. 9(2):427-431'
- Hidayah, Ratna, Rodatus Sofiah, Dan Suhartono. 2020. ANALISIS KARAKTERISTIK SAINS TEKNOLOGI MASYARAKAT (STM) SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN: SEBUAH STUDI LITERATUR. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. 7(1):1-18'
- Ismawanti, Renti. 2021. Dampak Manajemen Perubahan Lingkungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pegawai PT Telkom Indonesia TBK DIVREG 3 Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 12(1):57-62'
- Kasim, H. Muhammad. 2019. Perda Sebagai Bagian Hukum Di Indonesia. *Pleno De Jure*. 8(1): 63-75'
- Kusuma, Yohanes Surya. 2014. PENGARUH BRAND EXPERIENCE TERHADAP BRAND LOYALTY MELALUI BRAND SATISFACTION DAN BRAND TRUST HARLEY DAVIDSON DI SURABAYA. *Jurnal Manajemen Pemasaran*. 2(1):1-11'
- Pangaribuan, Meilinda Triana, Adis Imam Munandar. 2021. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 14(1):
- Siagia, Tigor, Imam Fachruddin, Rakhmah Zakiyah. 2020. OPTIMALISASI KINERJA DIVISI CHARTERING DAN MARKETING TERHADAP PENCAPAIAN TARGET MANAGEMENT PT. HUMPUSS TRANSPORTASI KIMIA. *Jurnal Ilmiah Nasional*. 13(1):15-25'
- Valerisha, Anggia, and Marshall Adi Putra, 'Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0.0 (2020), 131-37
- Wiryawan, I Wayan. 2020. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.

4. Sumber Lainnya

<https://kemensos.go.id/kemensos-tangani-dampak-covid-19-bagi-kelompok-rentan> diakses pada 15 September 2021

<https://akar.or.id/pandemi-covid-19-dan-ketahanan-sosial-masyarakat-pedesaan-bengkulu/> diakses pada 15 September 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/284754-perkembangan-kebijakan-daerah-sebagai-pa-5f33c381.pdf> diakses 16 September 2021

<https://www.rejanglebongkab.go.id/peta/> diakses pada 14 Januari 2022

<https://www.rejanglebongkab.go.id/gambaran-umum-kondisi-daerah/> diakses pada 16 Januari 2022

<https://rejanglebongkab.bps.go.id/> diakses pada 14 Januari 2022

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id>

<https://statistik.bengkuluprov.go.id/Ekonomi/pendudukmiskinKota/2020> diakses pada 19 Januari 2022

[https://rejanglebongkab.bps.go.id/indicator/23/53/1/jumlah-penduduk miskin.html](https://rejanglebongkab.bps.go.id/indicator/23/53/1/jumlah-penduduk-miskin.html) diakses pada 19 Januari 2022

